

SKRIPSI

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN
ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Makassar)**

**NUR ARIF
1057304 085 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN
ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Makassar)**

**NUR ARIF
1057304 085 13**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Makassar).
Nama Mahasiswa : Nur Arif
Nim : 105 73 04085 13
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Telah kami periksa dan telah di ujian skripsikan pada tanggal 12 Februari 2018.


Makassar, 19 Februari 2018

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak, CA, CPA
NBM : 1165166


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Menyetujui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Ekonomi

Ismail Badollahi, SE, M, SI, Ak, CA
NBM : 107 3428







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini atas Nama : **NUR ARIF** , Nim : **10573 04085 13** telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 017 tahun 1439 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

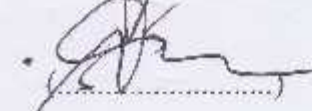
Jumadil Ula 1439 H
Makassar,
19 Februari 2018 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi & Bisnis) 
4. Penguji : Ismail Rasulong, SE.,MM
(.....) 

Abd Salam IIB, SE., M.Si. Ak. CA 

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CP. CPA 

Muh. Nur Rasyid, SE., MM 

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Rahmat Allah SWT, Segala puji dan Syukur Penulis Haturkan Kehadirat Allah SWT telah melimpahkan berkat dan anugrah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Study Pada Pemerintah Kota Makassar)”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan guna memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan, dan dukungan dari setiap pihak baik bantuan dari segi moril maupun dari segi materil kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE. M.Si,Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,M.Si.Ak.CA.CPAI, Selaku Pembimbing I dan Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan Kepada Penulis.
6. Seluruh Staff administrasi dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu.
7. Seluruh Pegawai Pemkot yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Pawa dan Ibunda Hasma yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan serta memberikan doanya yang tiada henti dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
9. Teman-teman Akuntansi 2 2013, yang telah mengutamakan kebersamaan, kekompakan serta dukungannya selama ini.
10. Kepada teman terbaikku yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT menerima dan membalas amal perbuatan baik dari semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan Skripsi ini dan

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum begitu sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pihak dalam menyempurnakan dan memperbaiki Skripsi ini untuk tujuan kedepannya. Semoga Skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat

Makassar, Februari 2018

Penulis

ABSTRAK

NUR ARIF, 2018 “Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar”. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. (Pembimbing 1. H. Andi Rustam, Pembimbing 2. Ismail Rasulong)

Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji partisipasi anggaran, kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, kantor dan badan. Pada SKPD Pemerintah Makassar terdapat 51 SKPD. Sedangkan sampel penelitian ini adalah kepala SKPD, sekretaris SKPD, dan kepala bagian pada setiap badan, dinas dan kantor di Pemerintah Makassar. Sehingga jumlah responden dalam sampel ini sebanyak 35 SKPD. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 27 pernyataan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS.

Berdasarkan Hasil penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota makassar.

Kata Kunci: Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anggaran	10
a. Pengertian Anggaran	10
b. Jenis-Jenis Anggaran	12
c. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	13
d. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	19
e. Manfaat Anggaran	21
B. Partisipasi Anggaran.....	21
1. Pengertian Partisipasi Anggaran	22
a. Tujuan dan Manfaat Partisipasi Anggaran	23
b. Keunggulan Partisipasi Anggaran	24
c. Kelemahaan Partisipasi Anggaran	25
2. Partisipasi Penyusunan Anggaran	27
C. Kejelasan Anggaran.....	30
D. Akuntabilitas Kinerja	32
1. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja.....	39
2. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	40
E. Kerangka Pikir dan Hipotesis	41
1. Kerangka Pikir.....	41
2. Hipotesis.....	42

BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
B. Metode Pengumpulan Data	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Makassar	47
1. Visi Pemerintah Kota Makassar	47
2. Misi Pemerintah Kota Makassar	47
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah	48
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	51
B. Deskripsi Hasil Pembahasan.....	52
1. Uji Validitas Dan Realibilitas	52
a. Uji Validitas	52
b. Uji Realibilitas	54
2. Uji Asumsi Klasik	56
a. Uji Normalitas.....	56
b. Uji Heteroskedastisitas	59
3. Pengujian Hipotesis	60
a. Uji Parsial (test-t).....	60
b. Uji Simultan (test-f).....	62
c. Uji Determinasi	63
4. Perhitungan Koefisien Regresi	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Partisipasi Anggaran.....	66
2. Kejelasan Anggaran.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72
RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar	47
5.1 Profil Responden SKPD Kota Makassar	51
5.2 Uji Validitas Partisipasi Anggaran	53
5.3 Uji Validitas Kejelasan Anggaran	53
5.4 Uji Validitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah	54
5.5 Uji Realibitas.....	55
5.6 One-Sample Kolmogrov- Smirnov Test	58
5.7 Uji Persial (Test T).....	61
5.8 Hasil Uji Statistik F.....	62
5.9 Uji Determinasi	64
5.10 Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40
2.2 Kerangka Pemikiran	42
4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar	50
5.1 Grafik Histogram.....	57
5.2 Normal Probability Plot.....	58
5.3 Uji Heteroskedasitas.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran sistem pengelolaan pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang (UU) No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan suatu proses politik. Dalam hal ini, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2010).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/ penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja pemerintah daerah

dalam penyusunan anggaran. Masing-masing satuan kerja pemerintah daerah memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA satuan kerja pemerintah daerah. Dalam RKA satuan kerja pemerintah daerah, masing-masing satuan kerja pemerintah daerah telah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input, output, dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran. Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik. Anggaran yang disusun harus sesuai dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Namun demikian, hingga saat ini masih sulit untuk melihat tolak ukur memadai yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara komprehensif. Padahal tolak ukur ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman, baik bagi pemerintah sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anggaran publik menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Organisasi pemerintah daerah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga

pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif. Dahulu penganggaran dilakukan dengan sistem *top-down*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan / pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan / pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan system ini mengakibatkan kinerja bawahan / pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (*overloaded*). Dalam proyeksi, atasan / pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan / pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan / pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini, sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah diatas, yakni anggaran partisipasi (*participatory budgeting*). Melalui sistem ini, bawahan / pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapai kesepakatan antara atasan / pemegang kuasa anggaran dan bawahan / pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut.

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting

dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang berakuntabilitas. Untuk mencapai akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan cara penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata (Mardiasmo,2010).

Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. Suatu anggaran harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, sehingga diperlukan partisipasi anggaran yaitu kerjasama yang baik dalam suatu tim yang terdiri dari bawahan dan atasan atau pegawai dan manajer. Partisipasi anggaran yang melibatkan bawahan bertujuan agar bawahan termotivasi untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran yang telah disusun bersama. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran ini juga merupakan suatu pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja. Prihandini (2011). Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunannya memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat, serta model-model perhitungan besaran (simulasi). Partisipasi penganggaran adalah proses yang menggambarkan individu-Individu yang terlibat dalam

penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Nor, 2007).

Berdasarkan penelitian tentang Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Bangun (2009) dalam tulisannya mengatakan perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu bagian penting dari karakteristik tujuan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Putra (2013) dalam tulisannya mengatakan dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mahsun et al. (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas sebagai bagian dari terciptanya *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Sopanah dan Wahyudi (2010) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.(Mbon, 2014).

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik dan mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat (Cahyani & Utama, 2015). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan melaporkannya secara transparan kepada publik sudah seharusnya diterapkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik. setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk

accountable kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana sekolah itu dibelanjakan. Selama ini sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus, defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan tiap siswa, sehingga pemerintah maupun stakeholders dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester atau tahunnya (Bastian 2007 dalam Sutedjo 2009).

Berdasarkan uraian pokok persoalan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti dengan melihat partisipasi anggaran dan kejelasan

anggaran pada instansi pemerintahan dalam menilai akuntabilitas kinerja. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul studi ini: **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?
2. Apakah kejelasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan eksplanatif atau penjelasan yang teruji tentang pengaruh:

1. Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
2. Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai
3. Kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pegawai

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terbagi dalam dua kategori:

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi penulis menambah khasanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan dalam bidang akuntansi manajemen dan keuangan daerah khususnya tentang partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan implikasikan terhadap kinerja aparat perangkat daerah.

2. Bagi Pemerintahan Kota Makassar

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota makassar didalam menyikapi fenomena yang berkembang sehubungan dengan partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja aparat perangkat daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak diacapai selama priode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sedengkan menurut M. Nafarin (2012) mengemukakan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Pengertian anggaran menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang dikutip oleh Tendi Haruman (2010) mengemukakan bahwa: “Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengundang nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik,

didiskusikan, dan di berikan masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuka tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perumusan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :

1. Aspek perencanaan
2. Aspek pengendalian
3. Aspek akuntabilitas publik

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelapora. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa

yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran / belanja)
- b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang mendanai rencana tersebut (pendapatan).

b. Jenis-Jenis Anggaran

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran sektor publik dibagi menjadi Dua:

1. Anggaran Operasional (*operation / recurrent budget*)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja rutin (*recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang pada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran Modal (*capital / investment budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan

pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

c. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Plainning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *over-*

spending, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintahan. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- b. menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*)
- c. menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
- d. merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijaksanaan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dan publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*Polotical Tool*). Oleh karna itu, pembuatan anggaran

publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*).

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*).

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*).

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*).

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintahan untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Penganggaran, tuna wisma dan kelompok lain yang terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

Sedangkan fungsi anggaran menurut Dedi Ismatullah (2010) adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.

c. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lain.

Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya:

a. Anggaran sebagai pedoman kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu anggaran, yaitu: Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

- 1) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup kegiatan yang dilakukan manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian.
- 2) Dinyatakan dalam unit moneter atau satuan ukur lainnya, yaitu suatu unit yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.
- 3) Jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukkan bahwa berlakunya suatu anggaran adalah untuk masa yang akan datang

d. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2010) Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan Anggaran.

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Priodik

Anggaran merupakan suatu proses yang priodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Menurut Dedi Nordiawan (2012) anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain:

- a. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
- b. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
- d. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.
- e. Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik, jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan.

e. Manfaat Anggaran

Menurut M.Nafarin (2012) manfaat anggaran antara lain:

1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3. Dapat memotivasi karyawan.
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi para manajer.

B. Partisipasi Anggaran

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Oleh karena itu, partisipasi anggaran yang baik adalah yang melibatkan atasan dan bawahan di dalam organisasi agar tidak terjadi partisipasi umum.

Partisipasi anggaran merupakan salah satu pendekatan *bottom-up* dalam proses penyusunan anggaran, dimana aliran data anggaran dalam suatu sistem partisipatif berawal dari tingkat tanggungjawab yang lebih rendah kepada tingkat tanggungjawab yang lebih tinggi. Setiap orang yang mempunyai tanggungjawab atas pengendalian biaya / pendapatan harus menyusun estimasi anggarannya dan menyerahkannya kepada tingkat manajemen yang paling tinggi. Estimasi tersebut.

kemudian ditinjau ulang dan dikonsolidasikan dalam gerakannya ke arah tingkat manajemen yang lebih tinggi (Garrison 2013:384).

1. Pengertian Partisipasi Anggaran

Bangun (2009) dalam Edwin (2014) mengemukakan partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Sedangkan menurut Bastian (2009) partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Wartono dalam Oka Lestariani Widiya (2007) mendefinisikan partisipasi anggaran adalah sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Hansen / Mowen (2013) mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai berikut: “Partisipasi anggaran adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran sebagai keikutsertaan manajer-manajer bertanggungjawab dalam

hal yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, dimana informasi yang dibutuhkan para manajer dapat diberikan oleh para bawahan secara aktual sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang baik dalam suatu anggaran tanpa mementingkan kepentingan manajer saja tapi juga bawahan dan mencakup perusahaan secara keseluruhan.

a. Tujuan dan Manfaat Partisipasi Anggaran

Tujuan anggaran menurut Kennis (1979) dalam Damanaik (2011) mengemukakan lima karakteristik tujuan anggaran yaitu:

a. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Dan besarnya pengaruh dalam menentukan sasaran anggaran.

b. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan di mengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Oleh sebab itu kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran.

c. Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Hal ini

akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan besarnya pengendalian manajer dalam penetapan anggaran.

d. Umpan Balik Anggaran

Menyatakan bahwa frekuensi atasan dalam meminta pendapat bawahan saat menentukan sasaran anggaran dapat memperoleh umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai. Hal ini merupakan variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer.

e. Kesulitan Sasaran Anggaran

Mengemukakan bahwa kesulitan sasaran anggaran mempunyai rentang sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, keputusan dalam menetapkan sasaran anggaran dapat dilakukan saat keyakinan telah di dapat.

Inti dari partisipasi anggaran adalah diperlukan kerjasama antara seluruh tingkatan organisasi. Manajer puncak biasanya kurang mengetahui bagian sehari-hari, sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari bawahannya. Dari sisi lain, manajer puncak mempunyai perspektif yang lebih luas atas perusahaan secara keseluruhan yang sangat vital dalam pembuatan anggaran secara umum.

b. Keunggulan Partisipasi Anggaran

Gerrison (2013) menyatakan keunggulan anggaran partisipatif sebagai berikut:

1. Setiap orang pada semua tingkat organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak.

2. Perkiraan anggaran disiapkan oleh manajer level bawah yang lebih akurat dan padat diandalkan dari perkiraan yang disiapkan oleh manajer level atas yang memiliki pengetahuan kurang detail mengenai pasar dan operasi sehari-hari.
3. Motivasi pada umumnya lebih tinggi ketika individu berpartisipasi dalam menetapkan tujuan mereka sendiri dari pada ketika tujuan yang dipakai dipaksakan dari atasan.

Partisipasi anggaran memiliki peran yang sangat penting untuk menaikkan kinerja perusahaan serta dapat menghasilkan keputusan dengan kualitas yang tinggi. Setiap anggota dalam sebuah organisasi diberikan tanggungjawab terhadap keputusan yang dihasilkan bersama. Keputusan yang dihasil bersama tersebut akan menimbulkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan tertentu perusahaan dan akhirnya mampu menaikkan kinerja.

c. Kelemahan Partisipasi Anggaran

Menurut Hansen / Mowen (2013) ada tiga potensi masalah yang menjadi kelemahan dalam partisipasi anggaran

1. Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Tujuan yang dianggarkan cenderung menjadi tujuan manajer saat partisipasi anggaran dimungkinkan, membuat kesalahan semacam ini dalam menyiapkan anggaran dapat mengakibatkan penurunan tingkat kerja. Partisipasi yang terlalu ketat dapat memastikan kegagalan dalam pencapaian standar dan membuat manajer frustrasi. Triknya adalah

mmembuat para manajer dalam anggaran partisipatif menetapkan tujuan yang tinggi, tetapi dapat dicapai.

2. Membuat kelonggaran dalam anggaran (sering disebut sebagai menutup anggaran). Kelonggaran anggaran (*budgetary slack*) atau menutup anggaran (*padding the budget*) muncul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan rendah atau meninggikan biaya dengan sengaja. Manajemen puncak harus berhati-hati dalam meninjau anggaran yang diajukan para manajer tingkat bawah dan menyediakan imput untuk menurunkan kelonggaran dalam anggaran.
3. Partisipasi semu (*Pseudoparticipation*) Partisipasi semu merupakan partisipasi palsu dari para manajer tingkat bawah atas proses penganggaran yang sudah ditetapkan jumlahnya oleh manajemen puncak. Manajemen puncak hanya mendapatkan persetujuan formal anggaran dari para manajer tingkat bawah bukan untuk mencari input sebenarnya, akibatnya tidak satu pun manfaat keperilakuan dari partisipasi yang akan didapat.

Masalah-masalah tersebut harus menjadi perhatian bagi manajemen perusahaan agar kemungkinan untuk terjadi dapat diminimalisir. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat di atasi dengan mengajak paramanajer berpartisipasi dalam menentukan target anggaran yang tinggi tetapi realistis untuk dicapai. Manajer puncak harus memeriksa kembali anggaran yang diusulkan bawahannya secara seksama serta memberikan masukan bila dibutuhkan.

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi adalah suatu “proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya.” Arfan dan Muhammad, (2008). Sedangkan Menurut Brownell (1982) dalam Eka Yuda (2013) partisipasi merupakan proses dimana individu-individu terlibat langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan proses penyusunan anggaran. Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini diperoleh dari hampir penelitian tentang partisipasi. Pada sektor publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Sedangkan Munandar (2000) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan pemerintahan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Menurut Mardiasmo (2010), terdapat empat siklus anggaran dalam sektor pemerintahan yang meliputi :

1. Tahap persiapan anggaran, Pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan adanya penafsiran tersebut maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, yaitu dengan cara melakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain adanya penaksiran perlu disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap Ratifikasi adalah tahap pengesahan rencana anggaran yang dilakukan Badan Eksekutif dengan Badan Legislatif agar menjadi anggaran final. Tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai *political skill*, dan *coalition building* yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan mental (*coalition building*) sangat penting, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi / pelaksanaan anggaran

Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan pemerintah. Dalam hal ini manajer keuangan publik mempunyai sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian

manajemen. Manajer keuangan publik bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati sebelumnya.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masalah.

a. Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran

Manfaat dari partisipasi dalam penyusunan anggaran menurut Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak (2005) adalah:

1. Partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen.
2. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya cenderung meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang tersebut, kemudian akan dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka.
3. Partisipasi berarti juga berkaitan dengan penurunan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini disebabkan orang

yang berpartisipasi dalam penetapan tujuan mengetahui bahwa tujuan tersebut wajar dan dapat dicapai.

4. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antara subunit organisasi, serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu.
5. Melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar-departemen. Dengan demikian, banyak masalah potensial yang berkaitan dengan anggaran dapat dihindari.

C. Kejelasan Anggaran

Kejelasan anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien (Schief dan Lewin,1970; Welsch, Hilton, dan Gordon, 1996 dalam Ikhsan dan Ane, 2007). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak

puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Suhartono dan Mochammad, 2007).

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran. Anggaran merupakan pedoman rencana manajemen dimasa yang akan datang mempunyai beberapa manfaat. (Yus faningrum, 2005) anggaran memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, dan berarti anggaran mewakili kesepakatan dari negosiasi diantara partisipasi dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan pada masa yang akan datang.
2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertidak sebagai blue print aktivitas perusahaan.
3. Sebagai alat komunikasi antar divisi, dimana anggaran sangat membantu melakukan komunikasi internal antar divisi dalam organisasi maupun dalam manajemen puncak.

Menurut Stteers dan Porter (1976) dalam Samuel (2008) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

1. Sasaran harus spesifik bukannya samar-samar.
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan:

1. Tujuan membuat secara terperinci tugas-tugas yang harus dikerjakan
2. Kinerja menyatakan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur
3. Standar, menetapkan standar / target yang dicapai.
4. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinas

Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Keterlibatan individu akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan yang akan dicapai.

D. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggung jawaban". Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Akbar (2011), akuntabilitas publik merupakan hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*public disclosure*), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan.

Menurut Wakhyudi (2007), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penerapan perencanaan strategi.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Mardiasmo (2010) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif sistem akuntabilitas, Mardiasmo (2010) menyebutkan beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini, yaitu :

1. Berfokus pada hasil.
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk pengukuran kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan.
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu.
5. Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur.

Sedangkan Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

2. *Process accountability*

Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).

3. *Performance accountability*

Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).

4. *Program accountability*

Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).

5. *Policy accountability*

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen keuangan daerah di era kebijakan otonomi, membutuhkan pola akuntabilitas publik melalui pembangunan sistem akuntansi pemerintahan. memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan proses pertanggung jawaban (*stewardship and*

accountability process), manajerial dan unsur pengendalian manajemen di pemerintah daerah. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik.

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*)
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Akuntabilitas publik juga melekat pada fungsi pengendalian dan pengawasan, artinya informasi yang disajikan terutama aspek pelaporan keuangan kepada publik harus *auditable* atau dapat diaudit oleh baik aparat internal dan eksternal pengawasan fungsional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat maupun auditor lainnya yang terkait. Sebaiknya

akuntansi pemerintahan sebagai penyedia informasi tidak hanya menyediakan informasi yang bersifat keuangan tetapi juga menyediakan informasi tentang penggunaan sumberdaya oleh setiap entitas publik yang terkait untuk mewujudkan landasan filosofi akuntansi pemerintahan (*non profit organization*) yang akuntabel dan transparan.

1. *Expectancy Theory*

Dalam *expectancy theory*, motivasi individu ditentukan oleh *expectancies* dan *valences*. *Expectancies* adalah keyakinan tentang kemungkinan bahwa perilaku tertentu (seperti misalnya bekerja lebih keras) akan menimbulkan hasil tertentu (seperti misalnya kenaikan gaji). *Valences* berarti nilai yang diberikan individu atas outcome (hasil) atau rewards yang akan dia terima.

2. *Goal Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua cognitions yaitu values dan intentions (atau tujuan). Yang dimaksud dengan values adalah apa yang dihargai seseorang sebagai upaya mendapatkan kemakmuran / *welfare*. Orang telah menentukan goal atas perilakunya dimasa depan dan goal tersebut akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu komit dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.

Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak stakeholders lain Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal
- b. Akuntabilitas horisontal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah

kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

1. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

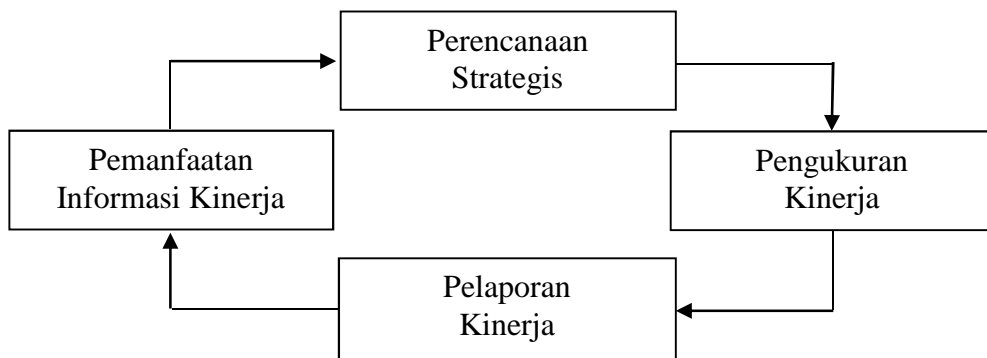
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

- a. Penetapan perencanaan stratejik.
- b. Pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan kinerja.
- d. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar: 2.1

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategi (*Renstra*) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

E. Kerangka Pikir dan Hipotesis

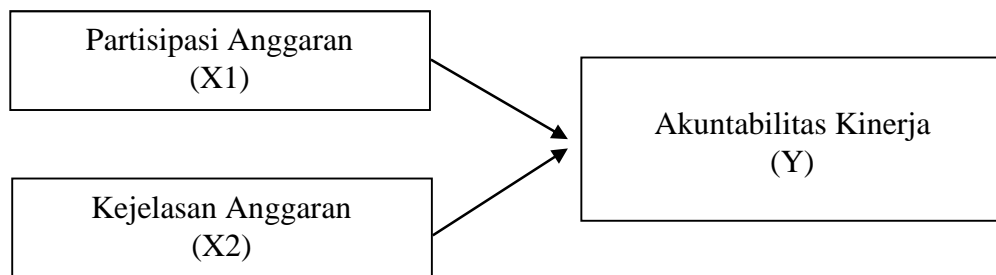
1. kerangka Pikir

Kerangka pemikiran ini merupakan model konseptual mengenai teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, kejelasan anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja

Sesuai dengan undang – undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah dan didanai oleh dana publik yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Partisipasi dalam penyusunan anggaran diperlukan dengan harapan manajemen lapisan bawah dapat memberikan informasi yang sesuai untuk tercapainya

suatu tujuan, sehingga anggaran tidak hanya dibuat oleh manajemen atas yang mungkin akan sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan dalam gambar 2.2.

Gambar: 2.2 Kerangka pikir



Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2017

2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut :

- H1: Partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
- H2: Kejelasan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kota Makassar. Makassar adalah sebuah kota yang dibatasi oleh Kabupaten Pangkajene Kepulauan disebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah selatan, dan Selat Makassar disebelah barat. Luas wilayah Kota Parepare tercatat 175,77 km², yang meliputi 15 kecamatan (Kecamatan Makassar, Panakkukang, Manggala, Tallo, Mamajang, Ujung Tanah, Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, Rappocini, Mariso, Ujung Pandang, Bontoala, Wajo, Kepulauan Sangkarrang) dan 153 kelurahan. Selain itu lingkup pemerintahan Kota Makassar memiliki 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini dimulai pada tanggal 06 Juni sampai dengan 25 Juli 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar
2. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Dokumentasi, dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang telah diperoleh.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat dalam 3 (tiga) instrumen penelitian, yaitu partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran yang diukur dengan tiga variabel, yaitu (partisipasi anggaran, kejelasan anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah). Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data subyek yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari responden yang menjadi subyek penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiono (2007). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintahan Kota Makassar dengan jumlah SKPD sebanyak 35 yang terdiri atas 1 organisasi Sekretariat, 7 Organisasi berbentuk Badan, 26 Organisasi berbentuk Dinas. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 responden, dari 35 responden hanya 1 responden dari setiap SKPD.

Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* karena responden yang dipilih hanya berkaitan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sampel penelitian terdiri dari kepala dinas, sekretaris, salah satu kepala bagian dari setiap SKPD, dan staf SKPD.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan ialah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variabel–variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang akan dibagikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap kuisisioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuisisioner.

F. Metode Analisis

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif Statistik inferensial yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan pada pemerintah kota makassar

Adapun alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 +$$

Dalam hal ini

a = Konstanta

Y = Akuntabilitas Kinerja

X1 = Partisipasi Anggaran

X2 = Kejelasan Anggaran

= Error

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum.

Pemerintah Kota Makassar sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga/ instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Visi Pemerintah Kota Makassar

Visi dari Pemerintah Kota Makassar yang ingin diwujudkan tahun 2014-2019 yaitu : “ Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota Dunia“.

2. Misi Pemerintah Kota Makassar

Dalam rangka mewujudkan visi dari pemerintah kota Makassar, maka, dijabarkan misi dari pemerintah kota Makassar yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2014 – 2019 yaitu :

- a. Merekonstruksikan nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia.

- b. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia
- c. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kota Makassar memiliki 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, dan kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Makassar

No	Instansi / Unit Kerja
1	Sekretariat Daerah (SEKDA)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum
7	Dinas Penataan Ruang
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Dinas Pemadam Kebakaran
10	Dinas Sosial
11	Dinas Ketenagakerjaan
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Ketahanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Dinas Kebudayaan
23	Dinas Perikanan dan Pertanian
24	Dinas Pariwisata
25	Dinas Perdagangan
26	Dinas Perpustakaan
27	Dinas Kearsipan

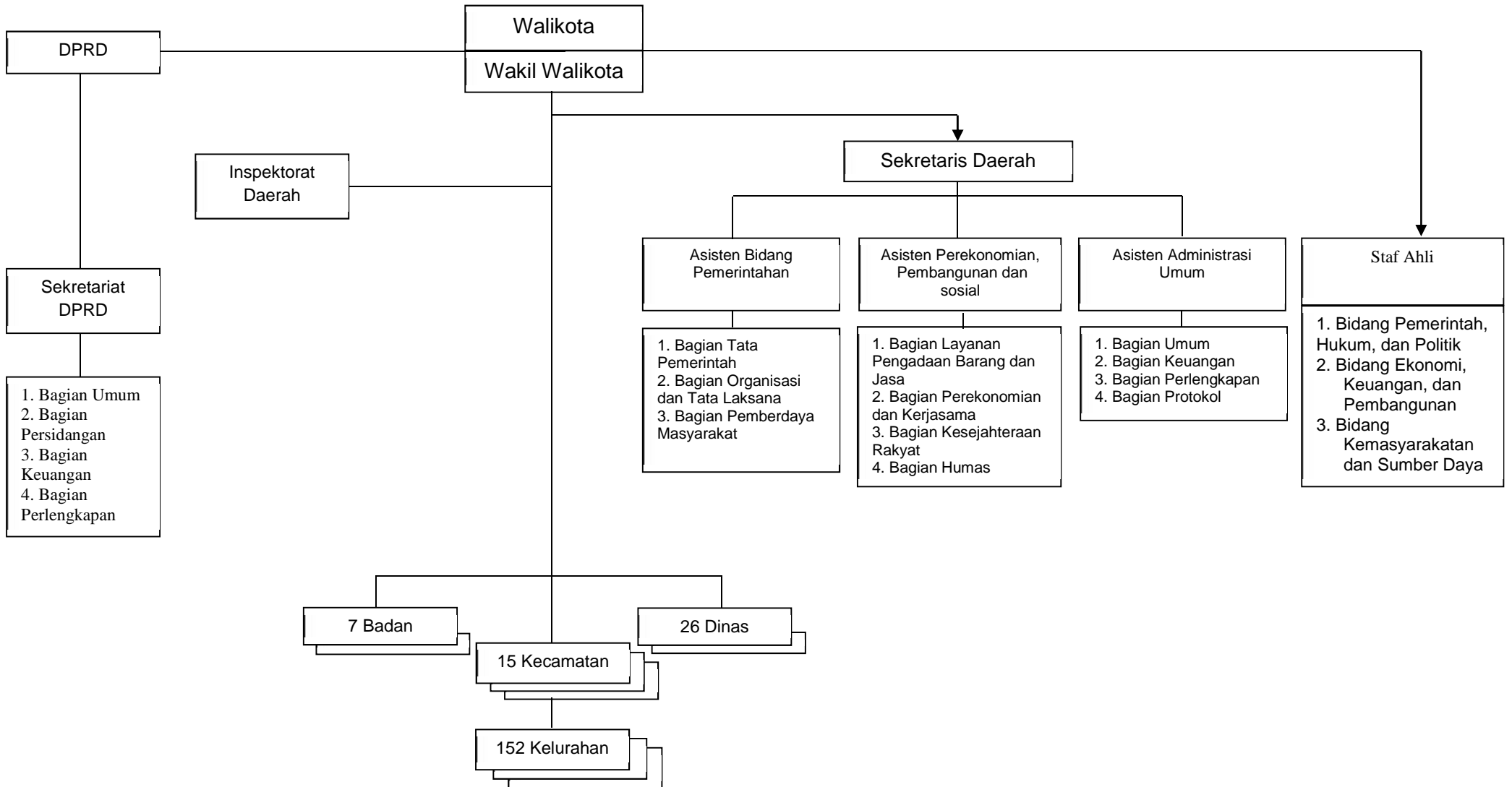
Lanjutan Tabel 4.1

No.	Instansi / Unit Kerja
28	Dinas Pertanahan
29	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
32	Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37	Kecamatan Makassar
38	Kecamatan Panakkukang
39	Kecamatan Manggala
40	Kecamatan Tallo
41	Kecamatan Mamajang
42	Kecamatan Ujung Tanah
43	Kecamatan Biringkanaya
44	Kecamatan Tamalanrea
45	Kecamatan Tamalate
46	Kecamatan Rappocini
47	Kecamatan Mariso
48	Kecamatan Ujung Padang
49	Kecamatan Bontoala
50	Kecamatan Wajo
51	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Pegawai Pemerintah Kota Makassar (SKPD) Kota Makassar. Pembagian kuesioner tersebut dimulai pada tanggal 06 juni 2017 dan diambil kembali pada tanggal 25 Juli 2017. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 35 kuesioner yang bersedia menjadi responden. Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan maka dapat dilihat profil Responden Pegawai SKPD Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir dan lama bekerja.

Tabel 5.1
Profil Responden SKPD Kota Makassar

Keterangan	Jumlah	<i>Presentase</i>
Jenis Kelamin:		
Wanita	18	51,42%
Pria	17	48,57%
Umur:		
21-30	9	25,71%
31-40	15	42,85%
40-50	8	22,85%
50-60	3	08,57%
Pendidikan:		
S1	23	65,71%
S2	12	34,28%
Lama bekerja:		
<10	9	25,71
>10	26	74,28

Sumber: Data diolah dari hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan pada tabel 5.1 mengenai gambaran umum profil responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah Wanita sebanyak 18 orang (51,42%) dan responden yang berjenis kelamin Pria sebanyak 17 orang (48,57%). Ini berarti dalam penelitian ini bahwa pegawai Wanita pada Pemerintah Kota Makassar (SKPD) Kota lebih dibutuhkan. Proporsi responden terbesar berkisar pada kelompok umur 31-40 tahun yaitu sebesar 15 orang (42,85%) karena pada usia tersebut merupakan usia kerja yang produktif, sedangkan responden terkecil pada kisaran 50-60 tahun sebanyak 3 orang (08,57%).

Selain itu, dijelaskan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah pada tingkat S1 yaitu sebanyak 23 orang (65,71%). Responden yang lama bekerja lebih dari 10 tahun merupakan responden yang terbesar yaitu sebanyak 26 orang (74,28). Hal ini berarti bahwa kinerja Pegawai Pemerintah Kota Makassar (SKPD) Kota Makassar sangat baik.

B. Deskripsi Hasil Pembahasan

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Spearman correlation* dan perhitungan menggunakan *SPSS 16.0 for windows*. Syarat minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r_{hitung} > r_{kritis}$ dimana $r_{kritis} = 0.3$. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan

tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukur. Untuk hasil perhitungan *Spearman correlation (output-nya)* sebagaimana terlampir. Dalam penelitian ini, terdapat 27 item pernyataan, dimana seluruh item pernyataan dikatakan valid karena telah memenuhi syarat $r_{hitung} > r_{kritis}$ dimana $r_{kritis} = 0.3$. Rincian pengujian validitas dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 5.2
Uji validitas Partisipasi Anggaran

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0,789	0,3	Valid
2	0,789	0,3	Valid
3	0,857	0,3	Valid
4	0,833	0,3	Valid
5	0,733	0,3	Valid
6	0,933	0,3	Valid
7	0,879	0,3	Valid
8	0,774	0,3	Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Tabel.5.3
Uji Validitas Kejelasan Anggaran (X2)

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0,429	0,3	Valid
2	0,484	0,3	Valid
3	0,484	0,3	Valid
4	0,426	0,3	Valid
5	0,426	0,3	Valid
6	0,426	0,3	Valid
7	0,452	0,3	Valid
8	0,452	0,3	Valid
9	0,452	0,3	Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Tabel 5.4

Uji Validitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Y)

No. Butir Instrumen	Koofesien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0,682	0,3	Valid
2	0,751	0,3	Valid
3	0,588	0,3	Valid
4	0,521	0,3	Valid
5	0,752	0,3	Valid
6	0,609	0,3	Valid
7	0,631	0,3	Valid
8	0,716	0,3	Valid
9	0,576	0,3	Valid
10	0,700	0,3	Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan table 5.2, 5.3 dan 5.4 tersebut menunjukkan tingkat validitas dari instrument yang digunakan sangat bagus. Dengan demikian 27 item instrument dapat melanjutkan pengujian berikutnya.

b. Uji Realibilitas

Pengujian realibilitas (keandalan) dilakukan setelah pengujian validitas dan hanya dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang valid saja. Berdasarkan hasil pengujian validitas terdapat 27 pernyataan yang valid, maka pernyataan tersebut dapat diuji reliabilitasnya. Uji realibilitas berfungsi untuk menguji apakah item pertanyaan didalam kuesioner dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menginterpretasikan tinggi rendahnya realibitas instrument, teknik pengujian reabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, hasil perhitungan menunjukkan reliabel bila

koefisien alphanya () lebih dari 0,60 artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian. Semakin besar nilai koefisien reabilitas, semakin reliabel pula data tersebut. Tidak terdapat batasan yang disepakati untuk itu, namun pada umumnya nilai koefisien realibilitas yang dapat diterima adalah 0,60 keatas. Hasil dari pengujian reliabel data untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini yakni Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5
Uji Realibilitas

Variabel	Koofesien Reliabilitas ()	Nilai batas Alpha ()	Keputusan
Partisipasi Anggaran (X1)	0.933	0,60	Reliabel
Kejelasan Anggaran (X2)	0.879	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	0.851	0,60	Reliabel

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan data pada tabel 5.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai *alpha cronbach's* pada variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas nilai 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrument

pernyataan koefisien menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian.

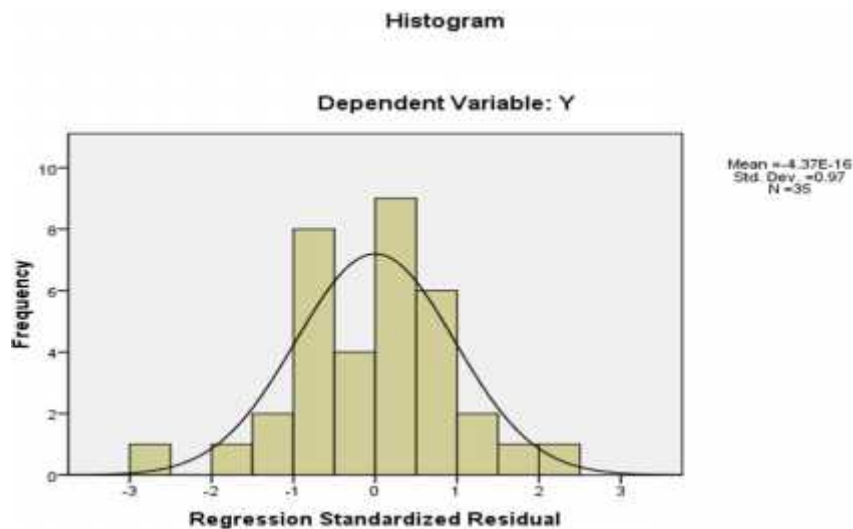
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram*.

Gambar 5.1

Grafik Histogram



Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini

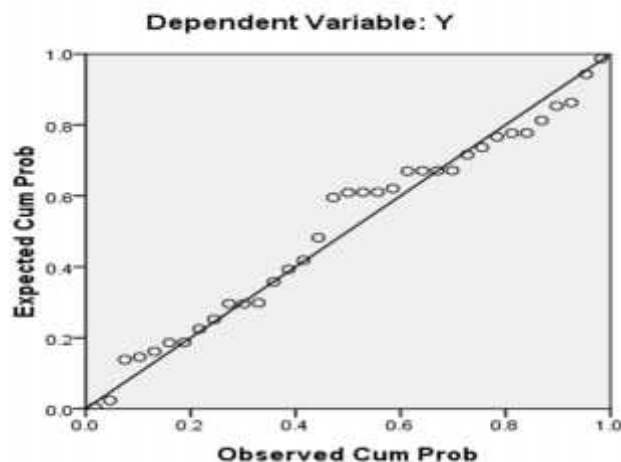
dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

Metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot*. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 5.2

Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Normal P-P Plot* menunjukkan bahwa titik-titik (dot) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal walaupun beberapa titik-titik agak menjauh di garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model tersebut telah memenuhi syarat asumsi normalitas. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa

model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Kedua yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai probabilitas (*Asym Sign*) lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05).

Tabel. 5. 6

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.99274386
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.073
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.835
Asymp. Sig. (2-tailed)		.488

a. Test distribution is Normal.

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

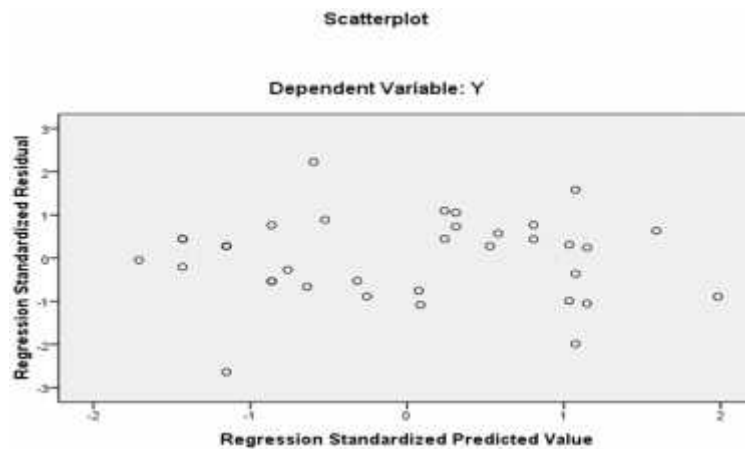
Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen memiliki data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai propabilitas (*asym.sign*) *Kolmogorov-Smirnov Test* yang diperoleh sebesar 0,488 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian pengujian regresi untuk pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilanjutkan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot*). Jika:

- 1) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 5.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk satu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian pengujian regresi untuk pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilanjutkan.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (test-t)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maka dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Rumusan hipotesis statistik sbb:

$H_a: \beta = 0$: secara parsial (individu) mempunyai pengaruh positif dan signifikan dari Sistem Informasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

$H_0: \beta \neq 0$: secara parsial (individu) tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan dari Sistem informasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Kriteria Pengujian:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

$t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7
Uji Parsial (test T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	30.815	9.446		3.262	.003		
X1	-.203	.161	-.193	-1.265	.215	.985	1.015
X2	.499	.168	.453	2.961	.006	.985	1.015

a. Dependent Variable: Y

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Dari tabel 5.9, diatas dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel:

- 1) Partisipasi Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai $df = n - k - 1 = 35 - 2 - 1 = 32$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu. Pada tabel 5.9 Partisipasi Anggaran $t = -1.265$, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-1.265 < 1,69389$. Maka H_a ditolak yang berarti Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpengaruh positive dikarenakan nilai signifikan $0,215 > 0,05$.

2) Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Uji t dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai $df = n - k - 1 = 35 - 2 - 1 = 32$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1,69389. Pada tabel 5.9 Kejelasan Anggaran $t = 2.961$ nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.961 > 1,69389$. Maka H_a diterima yang berarti berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dan berpengaruh secara positive dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan nilai signifikan $0,006 < 0,05$.

b. Uji Simultan (Test-F)

Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji simultan:

Tabel 5.8
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109.078	2	54.539	5.731	.007 ^a
	Residual	304.522	32	9.516		
	Total	413.600	34			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Dari uji F, didapat F_{hitung} sebesar 5.731 dengan tingkat signifikansi 0,007. Nilai probabilitas (0,007) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Diketahui bahwa F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 5.731, lebih besar dari F_{tabel} pada signifikansi $\alpha = 0,05$. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran (X_1), dan Kejelasan Anggaran (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Uji Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini dicari untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Partisipasi Anggaran (X_1), dan Kejelasan Anggaran (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai koefisien sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 100% tepat (sempurna) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 5.9
Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.514 ^a	.264	.218	3.085	2.242

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,218 yang menunjukkan bahwa tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi dipengaruhi oleh variabel Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran. sebesar 21.8% dan sisanya 78,2% (100% - 21,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian 21.8% cukup baik digunakan dalam penelitian ini.

4. Perhitungan Koefisien Regresi

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Untuk mendapatkan nilai dari persamaan regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10

Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	30.815	9.446		3.262	.003		
X1	-.203	.161	-.193	-1.265	.215	.985	1.015
X2	.499	.168	.453	2.961	.006	.985	1.015

a. Dependent Variable: Y

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran) terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 30.815 + -0.203 + 0,499 + e$$

Berdasarkan data diatas nilai konstanta sebesar 30.815 dimana apabila Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran mengalami penurunan atau kenaikan maka akan tetap berada di nilai 30.815. Dan Koefisien regresi Partisipasi Anggaran (X1) sebesar -0,203, Kejelasan Anggaran (X₂) sebesar 0,499 ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 1% maka akan mengalami peningkatan, dengan asumsi variable konstanta tetap dan variable lain tidak mempengaruhi.

Dan apabila partisipasi Anggaran (X1) dan Kejelasan Anggaran (X2) baik maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akan baik pula, dan sebaliknya apabila partisipasi Anggaran (X1) dan Kejelasan Anggaran (X2) buruk atau kurang baik maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akan buruk pula.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Partisipasi Anggran (X1)

Pada hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan Partisipasi Anggaran (X_1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat dilihat pada nilai t_{hitung} sebesar -1.265 tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,215) lebih besar dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar (0,05).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa Partisipasi Anggran sejalan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, jika Partisipasi Anggran baik maka dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,, demikian sebaliknya jika Partisipasi Anggaran atau maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kurang baik pula.

2. Akuntabilitas Kinerja (X2)

Pada hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan Kejelasan Anggaran (X_1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat dilihat pada nilai t_{hitung} sebesar 2.961. Berpengaruh secara signifikan

dikarenakan nilai signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,006) lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar (0,05).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa Kejelasan Anggaran (X_1) sejalan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), jika Kejelasan Anggaran baik maka dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) , demikian sebaliknya jika Kejelasan Anggaran kurang baik atau maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kurang baik pula.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari beberapa SKPD Kota Makassar melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda, hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji statistik f dan regresi linear berganda pada SKPD menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Hasil uji statistik t dan regresi linear berganda pada SKPD menyatakan bahwa Partisipasi Anggaran pada SKPD Kota Makassar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan nilai signifikan $0,215 > 0,05$ kecuali Kejelasan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan nilai signifikan $0,006 < 0,05$.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga ada beberapa saran yang diberikan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih berkualitas dimasa yang akan datang khususnya untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperoleh data melalui sumber lain seperti wawancara dari beberapa responden sehingga dapat lebih

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menghindari pengisian kuesioner yang tidak tepat.

2. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti komitmen organisasi, transparansi, akuntabilitas publik atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi maupun variabel intervening dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan Bagi peneliti atau calon peneliti yang lain agar menambah jumlah populasi dan sampel, misalnya memperluas penelitian tidak hanya di dinas pemerintah kota namun juga penelitian di dinas pemerintah provinsi maupun dinas pemerintah daerah pada daerah lain sehingga data yang didapat lebih luas dan dapat membandingkan antara dinas satu dengan dinas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Bangun, A. 2009. *SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)* Tesis, 111.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua : Salemba Empat
- Damanik, ayu zurlaini. 2011. Pengaruh budgetary goal characteristics dan keadilan prosedur terhadap kinerja manajerial. Tesis unversitas sumatra utara
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2012. *Akuntansi Sektor Publik* Jakarta: Salemba Empat
- Edwin, Fladimir Mbon. 2014. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Garrison, Noreen, Brewer. 2013. *Akuntansi Manajerial* (Edisi 14). Jakarta: Salemba Empat.
- Ginting, H. S. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Karo.
- Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Pare pare). Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hensen dan mowen 2013. *Akuntansi manajemen*, edisi delapan, salemba empat, jakarta
- Indarto, Stefany Lily dan Stephana Dyah Ayu. “Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, dan Job Relevant Information (JRI)”, Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Semarang, Januari 2011.

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H.A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.Mardiasmo.
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nobel, M. Darmansyah. “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”, Jom. FEKON Vol 2. No 2 ,Oktober 2015.
- Prihandini, A.N. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004, tentang
- Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Pemerintah Daerah , Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta
- Samuel Abel T.S. 2008. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan”. Tesis. Medan.
- Saragih, S. A. 2008. Pembuatan dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Batubara Riau Sebagai Adsorben. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zakiyudin, M. A. 2015. Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi , Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(1), 89–96.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Makassar, Mei 2017

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Dengan Hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar, saya:

Nama : Nur Arif

Nim : 105730408513

Fak/Jur : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Makassar)”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerjanya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penelitian kinerja di tempat Bapak/Ibu bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu merupakan faktor kunci untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran terhadap kinerja manajerial.

- Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor
- Yang tidak di isi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Umur : Tahun

3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

4. Pendidikan Ditamatkan : SMA
 Diploma 3
 Strata 1
 Strata 2
 Lainnya

5. Lama Bekerja : Tahun/Bulan

6. Bagian/Departemen :

7. Jabatan/Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian:

- a. Isilah semua nomor dalam angket ini dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan.
- b. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap nomor pernyataan).
- c. Pilhan jawaban:
 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
 2. Tidak Setuju (TS)
 3. Ragu-Ragu (RR)
 4. Setuju (S)
 5. Sangat Setuju (SS)

KUESIONER PARTISIPASI ANGGARAN (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Dalam menyusun anggaran, program, dan kegiatan, semua pihak ikut dilibatkan.					
2.	Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran.					
3.	Seberapa jauh keterlibatan saudara dalam penyusunan anggaran pada organisasi anda?					
4.	Seberapa logis/masuk akal nya alasan yang saudara berikan untuk merevisi anggaran yang dibuat?					
5.	Seberapa sering saudara memberikan pendapat atau opini tentang anggaran kepada atasan anda?					
6.	Seberapa penting kontribusi saudara terhadap proses penyusunan anggaran?					
7.	Seberapa jauh pengaruh saudara terhadap penetapan anggaran akhir pada organisasi anda?					
8.	Seberapa sering saudara dimintai pendapat atau opini saudara ketika anggaran disusun?					

KUESIONER KEJELASAN ANGGARAN (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya memahami persis apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya.					
2.	Saya mengerti tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didefinisikan secara jelas dan komprehensif.					
3.	Saya menyadari bahwa tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan hal yang penting dan perlu diprioritaskan.					
4.	Saya memiliki sasaran yang jelas yang membantu saya dalam melakukan pekerjaan.					
5.	Jika saya mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, saya mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting.					
6.	Tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara umum cukup jelas dan tidak membingungkan.					
7.	Menurut saya, tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.					
8.	Sasaran dalam pekerjaan saya cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit)					
9.	Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran.					

KUESIONER AKUNTABILITAS KINERJA (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3.	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4.	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6.	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
7.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
9.	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
10.	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					

Lampiran 2 : Hasil Jawaban Responden

PARTISIPASI ANGGARAN (X1)

Responden	Item Pertanyaan								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	4	4	4	4	5	33
2	4	4	4	5	5	5	5	5	37
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	5	5	5	4	4	4	4	4	35
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	4	4	4	5	4	4	4	33
10	5	5	5	5	5	5	5	4	39
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	4	4	5	4	5	4	5	4	35
16	4	4	4	4	5	4	4	4	33
17	5	5	5	4	5	5	5	5	39
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	5	5	5	4	4	4	4	4	35
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	5	5	4	4	4	4	4	5	35
25	5	5	4	4	4	4	4	4	34
26	5	5	4	3	4	4	5	5	35
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	5	5	4	4	5	4	4	4	35
29	4	4	4	4	5	4	4	4	33
30	5	5	5	5	5	5	5	5	40
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	5	5	5	5	5	5	5	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	5	5	5	4	5	5	4	4	37
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32

KEJELASAN ANGGARAN (X2)

Responden	Item Pertanyaan									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
2	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
6	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
8	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
9	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
10	4	5	5	4	4	4	5	5	5	41
11	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
13	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
15	4	4	4	5	5	5	3	3	3	36
16	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42
17	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
18	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	5	4	4	4	4	4	5	5	5	37
22	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
23	5	5	5	4	4	4	5	5	5	37
24	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
25	4	5	5	4	4	4	5	5	5	39
26	4	4	4	4	4	4	5	5	5	42
27	5	5	5	4	4	4	5	5	5	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	39
33	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
34	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

Responden	Item Pertanyaan										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	46
2	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	46
3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	45
6	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	46
7	3	5	4	4	4	4	4	5	5	4	42
8	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	46
9	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	48
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
11	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	46
12	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	44
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
15	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	40
16	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
17	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
18	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
21	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	42
22	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
23	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	33
24	3	5	5	5	4	5	5	4	4	5	45
25	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	40
26	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	47
27	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	45
28	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	44
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
32	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
33	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	47
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	44

LAMPIRAN 3 : Uji Kualitas Data

1. Uji Realibilitas

UJI REALIBILITAS DATA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

PARTISIPASI ANGGARAN (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.933	.933	8

KEJELASAN ANGGARAN (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.879	.879	9

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.850	.851	10

2. Uji Validitas

UJI VALIDITAS PARTISIPASI ANGGARAN (X1)

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009
VAR00001	Pearson Correlation	1	1.000**	.712**	.454**	.366*	.623**	.545**	.545**	.789**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.006	.031	.000	.001	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00002	Pearson Correlation	1.000**	1	.712**	.454**	.366*	.623**	.545**	.545**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.006	.031	.000	.001	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00003	Pearson Correlation	.712**	.712**	1	.675**	.591**	.776**	.712**	.480**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.004	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00004	Pearson Correlation	.454**	.454**	.675**	1	.673**	.862**	.716**	.611**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.006	.006	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00005	Pearson Correlation	.366*	.366*	.591**	.673**	1	.743**	.666**	.425**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.031	.031	.000	.000		.000	.000	.011	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00006	Pearson Correlation	.623**	.623**	.776**	.862**	.743**	1	.830**	.715**	.939**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00007	Pearson Correlation	.545**	.545**	.712**	.716**	.666**	.830**	1	.770**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00008	Pearson Correlation	.545**	.545**	.480**	.611**	.425**	.715**	.770**	1	.774**

	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.004	.000	.011	.000	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00009	Pearson Correlation	.789**	.789**	.857**	.833**	.733**	.939**	.879**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS KEJELASAN ANGGARAN (X2)

Correlations

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	
VAR00001	Pearson Correlation	1	.537**	.537**	.250	.250	.250	.352*	.352*	.352*	.429
	Sig. (2-tailed)		.001	.001	.147	.147	.147	.038	.038	.038	.010
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00002	Pearson Correlation	.537**	1	1.000**	.377*	.377*	.377*	.551**	.551**	.551**	.484*
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.025	.025	.025	.001	.001	.001	.003
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00003	Pearson Correlation	.537**	1.000**	1	.377*	.377*	.377*	.551**	.551**	.551**	.484*
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.025	.025	.025	.001	.001	.001	.003
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00004	Pearson Correlation	.250	.377*	.377*	1	1.000**	1.000**	.074	.074	.074	.426
	Sig. (2-tailed)	.147	.025	.025		.000	.000	.672	.672	.672	.011
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00005	Pearson Correlation	.250	.377*	.377*	1.000**	1	1.000**	.074	.074	.074	.426
	Sig. (2-tailed)	.147	.025	.025	.000		.000	.672	.672	.672	.011
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00006	Pearson Correlation	.250	.377*	.377*	1.000**	1.000**	1	.074	.074	.074	.426

	Sig. (2-tailed)	.147	.025	.025	.000	.000		.672	.672	.672	.011
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00007	Pearson Correlation	.352	.551**	.551**	.074	.074	.074	1	1.000**	1.000**	.452**
	Sig. (2-tailed)	.038	.001	.001	.672	.672	.672		.000	.000	.006
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00008	Pearson Correlation	.352	.551**	.551**	.074	.074	.074	1.000**	1	1.000**	.452**
	Sig. (2-tailed)	.038	.001	.001	.672	.672	.672	.000		.000	.006
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00009	Pearson Correlation	.352	.551**	.551**	.074	.074	.074	1.000**	1.000**	1	.452**
	Sig. (2-tailed)	.038	.001	.001	.672	.672	.672	.000	.000		.006
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00010	Pearson Correlation	.429	.484**	.484**	.426	.426	.426	.452**	.452**	.452**	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.003	.003	.011	.011	.011	.006	.006	.006	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

Correlations

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	
VAR00001	Pearson Correlation	1	.396	.374	.288	.453**	.295	.355	.522**	.174	.426	.682**
	Sig. (2-tailed)		.019	.027	.093	.006	.085	.037	.001	.318	.011	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00002	Pearson Correlation	.396	1	.436**	.234	.529**	.344	.517**	.510**	.421	.496**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.019		.009	.176	.001	.043	.001	.002	.012	.002	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00003	Pearson Correlation	.374	.436**	1	.450**	.206	.283	.132	.481**	.073	.353	.588**

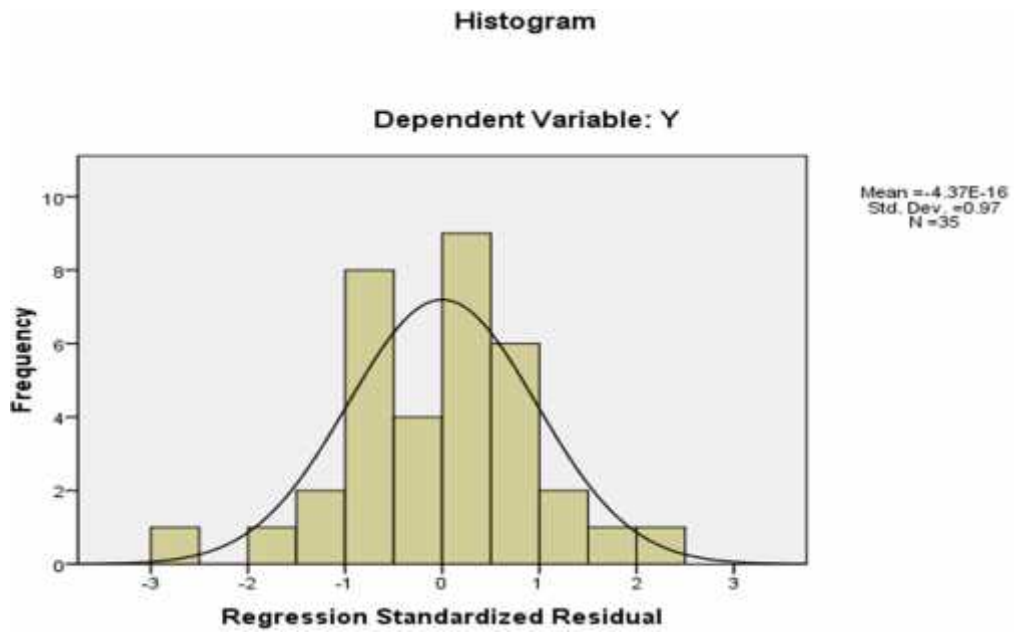
	Sig. (2-tailed)	.027	.009		.007	.234	.100	.451	.003	.678	.037	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00004	Pearson Correlation	.288	.234	.450**	1	.293	.307	.236	.258	.089	.275	.521**
	Sig. (2-tailed)	.093	.176	.007		.087	.073	.173	.134	.612	.109	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00005	Pearson Correlation	.453**	.529**	.206	.293	1	.440**	.530**	.363*	.524**	.604**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.234	.087		.008	.001	.032	.001	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00006	Pearson Correlation	.295	.344*	.283	.307	.440**	1	.459**	.264	.448**	.238	.609**
	Sig. (2-tailed)	.085	.043	.100	.073	.008		.006	.125	.007	.168	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00007	Pearson Correlation	.355*	.517**	.132	.236	.530**	.459**	1	.342*	.302	.303	.631**
	Sig. (2-tailed)	.037	.001	.451	.173	.001	.006		.044	.078	.077	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00008	Pearson Correlation	.522**	.510**	.481**	.258	.363*	.264	.342*	1	.464**	.444**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.003	.134	.032	.125	.044		.005	.007	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00009	Pearson Correlation	.174	.421*	.073	.089	.524**	.448**	.302	.464**	1	.401*	.576**
	Sig. (2-tailed)	.318	.012	.678	.612	.001	.007	.078	.005		.017	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00010	Pearson Correlation	.426	.496**	.353	.275	.604**	.238	.303	.444**	.401*	1	.700**
	Sig. (2-tailed)	.011	.002	.037	.109	.000	.168	.077	.007	.017		.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
VAR00011	Pearson Correlation	.682**	.751**	.588**	.521**	.752**	.609**	.631**	.716**	.576**	.700**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

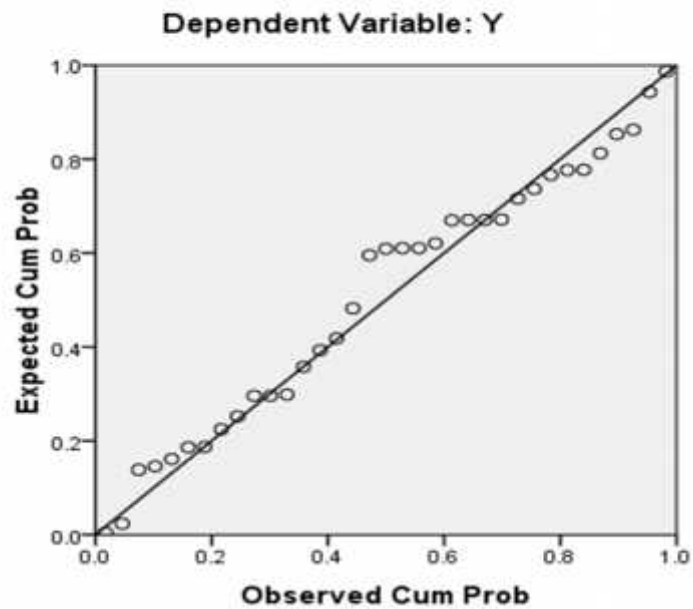
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 : Uji Asumsi Klasik

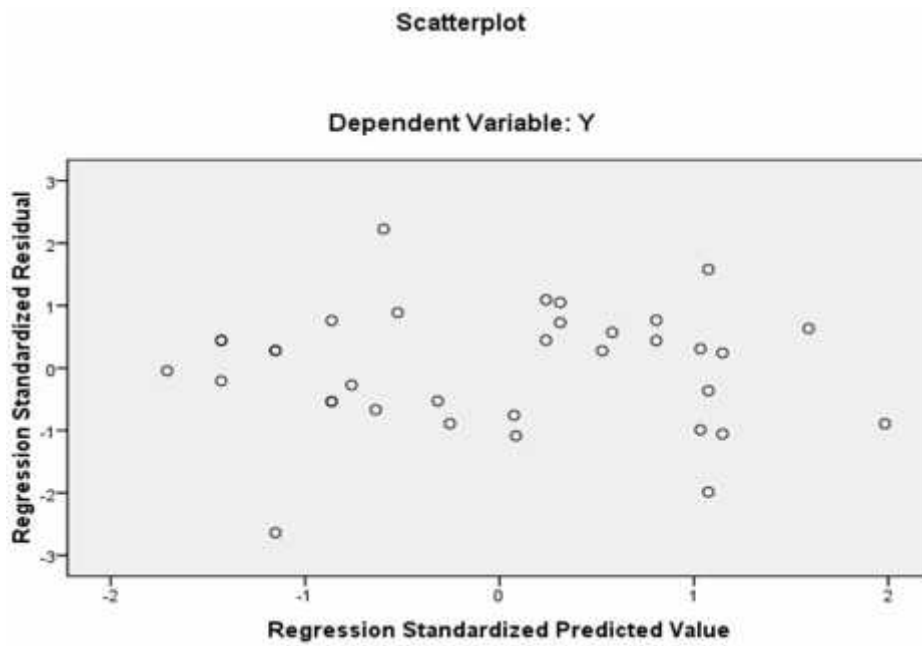
1. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2. Uji Heterokedasitas



Lampiran 5 : Uji Regresi Linear Berganda

HASIL OUTPUT SPSS 16.0 FOR WINDOWS

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.514 ^a	.264	.218	3.085	2.242

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109.078	2	54.539	5.731	.007 ^a
	Residual	304.522	32	9.516		
	Total	413.600	34			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	30.815	9.446		3.262	.003		
	X1	-.203	.161	-.193	-1.265	.215	.985	1.015
	X2	.499	.168	.453	2.961	.006	.985	1.015

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.990	1.000	.00	.00	.00
	2	.008	19.412	.00	.54	.34
	3	.002	38.489	1.00	.46	.66

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	40.14	46.75	43.20	1.791	35
Residual	-8.135	6.867	.000	2.993	35
Std. Predicted Value	-1.709	1.982	.000	1.000	35
Std. Residual	-2.637	2.226	.000	.970	35

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN – LAMPIRAN
SURAT

RIWAYAT HIDUP



NUR ARIF, Lahir di Kalosi pada Tanggal 27 Juni 1994 anak keempat dari Lima bersodara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Pawa dan Hasma. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Mis Muhammadiyah Kalosi Kec. Alla, Kab. Enrekang Tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007 kemudian tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Muhammadiyah Kalosi, Kec. Alla, Kab. Enrekang dan tamat pada Tahun 2010 kemudian penulis melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 Enrekang, Kec. Alla, Kab. Enrekang dan tamat pada tahun 2013 penulis melanjutkan pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Berkat Allah Swt. serta iringan Doa dan dukungan dari orang tua, akhirnya perjuangan dan kerja keras terwujud dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan dapat berhasil tersusunnya Skripsi yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kota Makassar)”